

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Efektivitas Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.5320/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) di Gabungan Kelompok Tani Mandiri Telukjambe masih belum efektif dalam hal mensejahterakan masyarakat dan melestarikan kawasan hutan meskipun beberapa program sudah berjalan dan sudah mulai dirasakan oleh masyarakat/petani, tetapi capaian nya adanya beberapa kendala yang terjadi. Tumpang-tindih lahan garapan, program yang belum berjalan dengan baik, konflik internal, pembiayaan yang belum berjalan dengan maksimal serta peran pemerintah dalam monitoring dan evaluasi harus lebih ditingkatkan agar tujuan dari perhutanan sosial tercapai.

Kendala Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanann Nomor SK.5320/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) di Gabungan Kelompok Tani Mandiri Telukjambe Bersatu, ada beberapa kendala yang terjadi yaitu adanya Tumpang-tindih lahan garapan, program yang belum berjalan dengan baik, konflik internal, pembiayaan yang belum berjalan dengan maksimal serta peran pemerintah dalam monitoring dan evaluasi harus lebih ditingkatkan agar tujuan dari perhutanan sosial tercapai.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat penulis berikan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Pemerintah harus serius dalam monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan program Izin Pemanfatan Hutan Perhutanan sosial di Gabungan Kelompok Tani Mandiri Telukjambe Bersatu.
2. Instansi pemerintah terkait yang berhubungan dengan program perhutanan sosial harus terlibat aktif dalam pelaksanaannya.
3. Pendampingan dalam upaya peningkatan efektifitas pelaksanaan perlu ditingkatkan dengan cara menyediakan pendamping yang berkualitas dan sekaligus mengusahakan agar pendampingan yang dilaksanakan tidak sekedar formalitas.
4. Perlu penambahan tata batas atau penanda yang jelas tentang di mana batas-batas lahan garapan agar tidak terjadi tumpang-tindih lahan garapan.
5. Perlu adanya solusi dari pemerintah tentang pembiayaan dalam pelaksanaan program Perhutanan Sosial agar tujuan peningkatan kesejahteraan tercapai.
6. Kesadaran kelompok tani dan masyarakat harus lebih ditingkatkan agar meminimalisir konflik yang terjadi.